



**UNIVERSITAS
MEDAN AREA**

**Edisi
Revisi
2025**

Sri Hidayani, S.H., M.Hum



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



**Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
2025**



UMA
Press

Editor: Adinda Syahputra, S.H

BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis : Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Desain Cover : Adinda Syahputra, S.H

Edit Layout : Adinda Syahputra, S.H

Editor : Adinda Syahputra, S.H

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN: **(Kosongkan)**

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

**Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Deliserdang, Sumatera Utara**

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

SINOPSIS

Buku ajar Hukum Perlindungan Konsumen ini disusun sebagai pedoman akademik untuk memahami secara komprehensif dasar-dasar, prinsip, dan praktik hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Disusun secara sistematis, buku ini menguraikan peran hukum dalam menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen sebagai pihak yang rentan, dan pelaku usaha sebagai pemilik kekuatan ekonomi dalam transaksi barang dan jasa.

Bab I: Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen

Bab ini membuka pembahasan dengan menelusuri sejarah lahirnya gerakan perlindungan konsumen. Ditekankan bahwa kebutuhan perlindungan konsumen muncul akibat industrialisasi dan modernisasi pasar yang kerap menempatkan konsumen dalam posisi lemah. Pembahasan kemudian diarahkan pada pengertian perlindungan konsumen, asas-asas penting seperti keadilan, manfaat, dan keseimbangan, serta tujuan dari hukum ini dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Bab ini juga menyinggung sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, termasuk undang-undang, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi, serta isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Bab II: Konsumen dan Pelaku Usaha

Bab ini menguraikan dua subjek utama dalam hukum perlindungan konsumen: konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dijelaskan tidak hanya sebagai pengguna akhir suatu produk, tetapi juga sebagai pemilik hak-hak hukum yang sah, seperti hak atas informasi dan hak atas ganti rugi. Sementara pelaku usaha dijelaskan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan hukum terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dijelaskan secara rinci, guna menunjukkan adanya keseimbangan hukum yang adil dan rasional dalam transaksi ekonomi.

Bab III: Prinsip-Prinsip Hukum, Klausula Baku, dan Ruang Lingkup

Dalam bab ini, dijelaskan prinsip-prinsip hukum yang menjadi fondasi perlindungan konsumen, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Salah satu pembahasan utama adalah mengenai klausula baku, yaitu ketentuan kontraktual yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan kerap menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi konsumen. Jenis-jenis klausula baku serta bahaya penyalahgunaannya dianalisis secara kritis. Selain itu, dijelaskan pula ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang mencakup aspek hukum privat dan hukum publik.

Bab IV: Badan Pengawas dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bab ini fokus pada aspek kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama-tama, dibahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi keamanan produk, khususnya makanan dan obat kadaluarsa. Diuraikan pengertian, tugas, dan kewenangan BPOM dalam mencegah kerugian konsumen. Selanjutnya, bab ini membahas beragam jalur penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui pengadilan (litigasi), maupun jalur non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Diuraikan pula prosedur penyelesaian sengketa di BPSK, mulai dari pengajuan pengaduan hingga pelaksanaan putusan.

Bagian Penunjang: Daftar Pustaka dan Lampiran

Sebagai pelengkap, buku ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan akademik serta lampiran undang-undang dan keputusan menteri terkait, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dokumen hukum ini membantu pembaca memahami ketentuan formal yang berlaku dalam praktik perlindungan konsumen.

Penutup

Secara keseluruhan, buku ajar ini menyajikan pendekatan teori dan praktik hukum perlindungan konsumen secara holistik. Materi yang disajikan tidak hanya mencakup pengantar dan pengertian dasar, tetapi juga menjangkau isu-isu kontemporer dan teknis penyelesaian sengketa. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum, dosen, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen, serta masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperjuangkan hak-hak konsumen secara berkeadilan.

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis untuk membantu proses belajar mengajar khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen. Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan konsumen semakin hari terus meningkat, hal disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Buku ini ditujukan bagi para mahasiswa Fakultas hukum yang mengambil mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, berisi materi-materi yang penulis anggap penting. Dalam penulisan buku ini, penulis mengambil referensi selain dari literature buku-buku tentang hukum perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal-jurnal hukum perlindungan konsumen. Harapan penulis bagi para pembaca khususnya Mahasiswa menjadi sangat memahami terkait permasalahan tentang konsumen dan penyelesaiannya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu serta selalu mendukung penulis dalam proses mengajar, serta yang selalu memberikan penulis dorongan untuk menjadi dosen terbaik, penulis mengucapkan kepada Ayahanda Alm. Syafaruddin, SH, M.Hum, dan Ibunda Alm. Ana Chandra, serta dukungan suami dan anak-anak tercinta yaitu IPDA Ardiansyah Gultom, SH, Daffa Satritama Gultom, Zahra Shakilla Gultom. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

Penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan buku ajar ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita

semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT,
Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 10 Juni 2025

Penulis

Sri Hidayani, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I LATAR BELAKANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	1
1.1. Sejarah Perlindungan Konsumen	1
1.2. Pengertian Perlindungan Konsumen	7
1.3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	10
1.3.1. Asas Perlindungan Konsumen	10
1.3.2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	14
1.4. Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen	16
1.5. Isu-Isu Hukum Perlindungan Konsumen	19
BAB II KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	25
2.1. Pengertian Konsumen	25
2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
2.2.1. Hak-Hak Konsumen	28
2.2.2. Kewajiban Konsumen	30
2.3. Pengertian Pelaku Usaha	31
2.4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
BAB III PRINSIP-PRINSIP HUKUM, KLAUSULA BAKU, DAN RUANG LINGKUP DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	38
3.1. Prinsip- Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	38
3.2. Klausula Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	42
3.2.1. Pengertian Klausula Baku Menurut Para Ahli:	44
3.2.2. Jenis-Jenis Klausula Baku Yaitu:	46
3.3. Ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	47
3.3.1. Aspek Hukum Publik Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ...	47
3.3.2. Aspek Hukum Publik Dalam Hukum Perlindungan Konsumen ...	50
BAB IV BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KADALUARSA DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	54
4.1. Badan Pengawas Obat dan Makanan	54

4.1.1.	Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kadaluarsa	54
4.1.2.	Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kadaluarsa.....	58
4.1.3.	Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kadaluarsa.....	58
4.1.4.	Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kadaluarsa	61
4.2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	62
4.3.	Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).....	65
4.3.1.	Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen dan cara pengaduannya di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	68
4.3.2.	Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	72
4.3.3.	Tata Cara Penyelesaian Sengketa di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).....	74
4.4.	Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		85
LAMPIRAN.....		88
A.	UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	88
B.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	144